|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Sulteng Post | KasubaudSulteng I |
| Hari, tanggal | : | Kamis, 29 Januari 2014 |
| Keterangan | : | Tim peneliti menemukan, adanya dugaan cloning APBD tahun 2011 yakni dana bagi hasil (DBH) di sektor sumber daya alam (SDA). |
| Entitas | : | Donggala |
|  |

**Palu, Metrosulawesi.com -** Sebuah penelitian terhadap anggaran sektor kehutanan dan lahan tahun 2011-2014 di Kabupaten Donggala ditemukan fakta yang mencengangkan. Tim peneliti menemukan, adanya dugaan cloning APBD tahun 2011 yakni dana bagi hasil (DBH) di sektor sumber daya alam (SDA).

“Kuat dugaan bahwa terjadi cloning dokumen APBD yang dilakukan oleh Pemda Donggala untuk memanipulasi sumber-sumber penerimaan negara dari sektor sumber daya alam khususnya dari kehutanan,” ungkap Rofandi, tim peneliti Koalisi KPPA Sulteng saat memaparkan temuan tersebut di Sutan Raja Hotel Jalan Abdul Rahman Saleh, Palu, Kamis (29/1).

Publikasi atas temuan itu dipaparkan dalam seminar tentang politik anggaran sektor hutan dan lahan di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Sigi. Selain tim peneliti, dua panelis lainnya dalam seminar yakni Kepala Seksi Pembentukan KPH, Idrus Habibi dan Knowledge Manager of FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Hadi Prayitno.

Rofandi menjelaskan hasil risetnya bahwa penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan Kabupaten Donggala setelah dilakukan telaah dokumen terjadi penyajian data dokumen penjabaran realisasi APBD tahun 2011 yang tidak sinkron.

Dia menguraikan, nilai penerimaan dana yang diperoleh dari bagi hasil provisi sumber daya hutan yang tertera dalam dokumen APBD tahun 2011 sebesar Rp 777 juta. Sedangkan berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang ditransfer ke rekening Pemda sebesar Rp 3 miliar atau tepatnya Rp3.099.198.663 miliar.

Kemudian juga dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit BPK Nomor 08.A/LHP/XIX.PLU/04/2013 jelas tertera bahwa jumlah pemerimaan dari SDA Kehutanan dari DBH sebesar Rp 3.099.198.663 miliar.

Dua sumber data yakni dari BPK dan Kemenkeu sama, namun berbeda dengan dokumen APBD tahun 2011 yang hanya sebesar Rp 777 juta. Padahal, kata dia LKPD adalah hasil audit BPK yang bersumber dari dokumen APBD realisasi tahun 2011 juga.

Tim peneliti juga menemukan sejumlah fakta bahwa dalam dokumen realisasi APBD tahun 2011 tidak tercatat dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan umum. Padahal, pendapatan DBH SDA di Donggala yang didominasi sektor pertambangan umum di tahun 2012 dan 2013 masing-masing tercatat Rp 2,5 miliar dan Rp 5,3 miliar.

Begitu pula dokumen penjabaran realisasi APBD 2013 untuk  pertambangan minyak dan bumi tahun juga tidak tercatat. Selain itu, iuran penguasaan hutan tahun 2012 dan 2013 juga tidak tercatat.

“2012 dan 2013 kami tidak menemukan penerimaan bagi hasil iuran penguasaan hutan,” ujarnya.

Knowledge Manager of FITRA Hadi Prayitno memastikan bahwa data tersebut valid karena melalui proses telaah oleh tim peneliti. Hadi Prayitno yang menjadi editor dalam penyusunan hasil penelitian tersebut mengatakan angka yang dipaparkan merupakan realiasi APBD, bukan berupa alokasi APBD.

Menurutnya, DBH SDA berkontribusi signifikan terhadap anggaran daerah. Di Provinsi Sulteng dan 13 kabupaten/ kota 2014 kontribusi sebesar Rp193,3 miliar. Pada sektor kehutanan Rp19,027 miliar; pertambangan Rp136,8 miliar; migas Rp37,4 miliar; dan perikanan Rp4,4 miliar.